

PEMBERANGKATAN HAJI 2022

Kemenag Siapkan 3 Skenario

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama menyiapkan tiga skenario pelaksanaan dan pemberangkatan jemaah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi, kendrai belum ada kepastian dari otoritas Arab Saudi apakah akan membuka atau tidak penyelenggaraan ibadah haji.

"Meningkat sampai saat ini wabah Covid-19 belum berakhir, yang ditandai dengan munculnya varian Omicron, maka Pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan haji," ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Kamis (13/1).

Wamenag menyampaikan, ada tiga opsi yang disiapkan, yakni secara kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan haji seperti dua tahun sebelumnya demi keselamatan bersama.

Zainut Tauhid menjelaskan, Pemerintah hingga saat ini tetap bekerja dengan menyiapkan opsi pertama. Sejumlah mitigasi disiapkan, seperti siapa saja calon jemaah yang akan

diberangkatkan hingga rencana penerbangan. "Kita semua berharap wabah ini segera berakhir, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan secara normal seperti penyelenggaraan ibadah haji pada tahun sebelumnya," katanya.

Calon jemaah haji yang akan diberangkatkan adalah mereka yang berhak berangkat pada tahun 1441 Hijriah/2022 Masehi. Calon jemaah haji telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) maupun yang belum sempat melunasi BPIH. "Serta tidak melakukan pembatalan hajinya," katanya.

Kemenag telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara penerbangan haji

1441 H/2020 M yakni Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Flynas.

Dari hasil tersebut, Kemenag mengambil kebijakan tidak akan menerapkan pembatasan jarak (social distancing) demi efisiensi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. "Keputusan ini diambil dengan alasan seluruh penumpang sudah divaksinasi, swab (tes usap), dan karantina, serta dalam rangka efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji mengingat begitu besarnya biaya yang harus ditanggung jemaah haji," jelasnya.

Persiapan lainnya yakni terus berkoordinasi dengan Arab Saudi soal kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji, pengintegrasian Siskohat dengan aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna, simulasi pemberangkatan jemaah, hingga penerapan pembatasan jarak dalam pelayanan di embarkasi Indonesia maupun Arab Saudi. (Ati)-f

TERINDIKASI PENERIMAAN SUAP

Bupati Penajam Paser Utara Ditangkap

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/1) kembali melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah. Ketua KPK Firlil Bahuri mengatakan, pihaknya menangkap Bupati Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Gafur Mas'ud beserta 10 orang lainnya atas kasus dugaan korupsi.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaganya menangkap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di wilayah DKI Jakarta. "Yang bersangkutan ditangkap di Jakarta beserta beberapa pihak lainnya," kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/1).

Selain di Jakarta, Tim KPK juga menangkap beberapa pihak di Kalimantan

Timur. "Selebihnya dan juga diamankan di Kalimantan Timur," kata Ali Fikri.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon menyatakan penangkapan Abdul Gafur Mas'ud dan kawan-kawan terkait dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi. Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu.

Meski demikian, Firlil belum menyampaikan secara rinci siapa 10 orang lainnya yang turut ditangkap tersebut. Menurutnya, tim KPK saat ini masih bekerja memeriksa pihak-pihak yang telah ditangkap itu.

"Terima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak sehingga KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," tutur Firlil. (Ful)-d

SEWINDU UU DESA

Dana dan Ekonomi Meningkat

JAKARTA (KR) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar kembali menegaskan dampak positif dari Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 bagi pemerataan ekonomi desa yang berkeadilan. Meningkatnya pemanfaatan dana desa dan serta beberapa indikator perekonomian level desa mempertegas hal tersebut.

"Dana Desa tahun 2021 ada peningkatan. Tahun 2020 Rp 71 triliun, naik menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2021. Penyelesaiannya juga bagus, tahun 2021 mencapai 99,80 persen atau setara Rp 71,85 triliun. Di saat yang sama, Begitu juga tingkat kemiskinan, pendapatan dan tingkat ketimpangan ekonomi, ada progres. Ini modal penting kita menatap tahun 2022," tegasnya saat meninjau persiapan raker di Jajaran Kemendes PDTT, Rabu (12/1).

Gus Halim menceritakan Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu

dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurut Gus Halim, peningkatan pemanfaatan Dana Desa sudah pasti akan berdampak pada naiknya APBDes. Sebagai informasi, sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Bagi hasil dan Retribusi, Dana Desa sendiri, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan hingga hibah atau sumbangan yang tidak mengikat.

Pada tahun 2014 atau sebelum ada Dana Desa, rata-rata APBDes itu Rp 329 juta/desa. Tahun 2015 saat Dana Desa dikurikan langsung melesat menjadi Rp 701 juta/desa, bahkan pada tahun 2021, rata-rata APBDes melonjak hingga Rp 1,6 miliar/desa.

"Sepanjang pandemi, APBDes masih meningkat dari total Rp117 triliun pada 2019 menjadi Rp 121 triliun pada 2021," katanya. (Ati)-d

CEGAH RISIKO TERPAPAR COVID-19

472.801 Lansia DIY Ditarget Ikuti Vaksinasi Booster

YOGYA (KR) - Pemda DIY mengadakan vaksinasi booster massal di Jogja Expo Center (JEC) selama 3 hari dengan total target 5.000 atau setiap harinya 1.500 warga yang dimulai Kamis (13/1). Target utama dari vaksin booster adalah para lansia di DIY yang jumlah totalnya 472.801.

"Saat ini vaksin booster dipriori-

taskan untuk lansia dan mereka yang berkomorbid. Selain itu juga untuk ASN guru dan tenaga pendidikan. Adapun untuk penerima booster diberikan bagi mereka yang divaksinasi dosis pertama dan kedua Sinovac. Sedangkan yang basicnya AstraZeneca, Insya Allah minggu depan booster, karena hanya bisa pakai Moderna

yang levelnya agak beda tapi heterolog," kata Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembujun Setyaningastutie disela-sela acara kick off vaksinasi booster di Jogja Expo Center (JEC), Kamis (13/1). Acara ini ditinjau langsung Wakil Gubernur DIY Paku Alam X.

Pembujun mengatakan, setelah lansia dan ASN, guru dan tenaga kependidikan maupun pelayan publik, program vaksin booster akan dilanjutkan masyarakat umum. Sesuai arahan pusat pemberian booster gratis atau tidak dipungut biaya. Namun yang tidak seperti vaksinasi sebelumnya, booster ini hanya bisa diberikan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Pemerintah.

"Fasyankes Pemerintah itu kan terbatas, maka boleh vaksin booster dengan Fasyankes yang lain tetapi dengan monitor atau koordinasi Fasyankes pemerintah. Misalnya ada pihak ketiga mau melakukan pelayanan, silakan saja tapi harus terkoordinasi dengan pemerintah. Intinya itu tidak boleh

lagi sendiri," terang Pembujun.

Ditanya lebih lanjut mengapa ASN menjadi salah satu yang ditargetkan, selain karena tentunya merupakan pelayanan publik, juga pengkoordiniran lebih mudah dilakukan, mengingat DIY memiliki vaksin jenis AstraZeneca yang harus habis pada akhir Januari.

Sementara itu Wagub DIY Paku Alam X menyatakan, vaksin booster kali ini diprioritaskan untuk Lansia terutama bagi mereka dengan komorbid. Hal itu dilakukan untuk mengurangi risiko fatal paparan Covid-19. Mengingat Covid-19 varian Omicron lebih berisiko bagi kelompok tersebut.

"Hari ini kita kick off vaksinasi booster untuk lansia di DIY. Selain lansia kita juga menyertakan teman-teman ASN untuk dibooster, tapi prioritas tetap lansia dan yang komorbid. Beberapa kali teleconference dengan Jakarta memang varian yang baru ini lebih banyak yang berisiko bagi yang lansia dan komorbid," jelas Wagub DIY. (Ria)-d

DIDUKUNG DANA KEISTIMEWAAN SRI dan Jogoboro Penguat Keistimewaan DIY



KR-Devid Permana

Podcast Rembag Kaistimewaan bertajuk 'Peran Satlinmas Rescue Istimewa dan Jogoboro dalam Keistimewaan DIY'.

KEISTIMEWAAN Yogyakarta mencakup banyak bidang, tidak hanya terkait kebudayaan atau hanya terkait pariwisata saja. Keistimewaan ternyata juga mengurus soal ketenteraman dan ketertarikan masyarakat, salah satunya dengan keberadaan Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) dan Jogoboro dalam Keistimewaan DIY.

Paniradya Pati Kaistimewaan DIY Aris Eko Nugroho SP MSI mengatakan, tujuan utama Keistimewaan Yogyakarta adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Adapun kaitannya dengan SRI dan Jogoboro, menurut Aris, bahwa keberadaan SRI dan Jogoboro ini telah ada sebelum adanya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) tahun 2012.

"Artinya di posisi tahun 2022, Keistimewaan Yogyakarta dengan adanya Dana Keistimewaan (Danais), posisinya adalah untuk lebih menyempurnakan SRI dan Jogoboro sebagai salah satu cikal bakal keistimewaan," terang Aris dalam podcast Rembag Kaistimewaan bertajuk 'Peran Satlinmas Rescue Istimewa dan Jogoboro dalam Keistimewaan DIY'.

Podcast Rembag Kaistimewaan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewaan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewaan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepa-

tihan Danurejan Yogyakarta, Kamis (13/1) dan ditayangkan *live streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewaan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewaan>. Kegiatan ini didanai dengan Dana Keistimewaan.

Rembag Kaistimewaan menghadirkan narasumber lain Marjono (Koordinator Wilayah Satlinmas Rescue Istimewa DIY) dan Ahmad Hartono (Anggota Tim Jogoboro DIY) dipandu Wijil Rachmadhani. Podcast Rembag Kaistimewaan di awal tahun 2022 ini terasa istimewa karena diselenggarakan di gedung baru Paniradya Kaistimewaan DIY.

Menurut Aris, di tahun 2021 gedung baru Paniradya Kaistimewaan selesai dibangun. Gedung baru ini berbatasan langsung dengan Jalan Suryatmajan dan Jalan Malioboro. Diharapkan dengan adanya gedung baru ini memberi semangat baru bagi Paniradya Kaistimewaan DIY dalam menjalankan tugas-tugasnya. "Kami pindah ke gedung baru ini tanggal 26 Desember 2021 dan mulai ber Kantor pada 27 Desember 2021," katanya.

Maka dari itu, penyelenggaraan podcast sengaja bertempat di gedung baru ini untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Paniradya Kaistimewaan berpindah gedung. Selain itu

menyampaikan kepada Sahabat Istimewa, bahwa gedung baru ini merupakan tempat diskusi bagi semua elemen masyarakat.

Paniradya juga terus berinovasi dalam penyelenggaraan podcast Rembag Kaistimewaan agar bisa dinikmati semua kalangan termasuk penyandang disabilitas (tuna rungu). Mulai tahun 2022, podcast menghadirkan penerjemah diperuntukkan bagi penyandang disabilitas (tuna rungu) agar bisa mengetahui tentang Keistimewaan Yogyakarta. Selain persembahan hiburan tari-tarian dan lagu di sela-sela podcast yang sebelumnya dilakukan secara tidak langsung (taping) saat ini dilakukan secara langsung (live).

Kembali menyinggung tema podcast Peran SRI dan Jogoboro dalam Keistimewaan DIY, Aris menuturkan bahwa, Paniradya Kaistimewaan DIY bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membawahi SRI yaitu Satpol PP dan Dinas Kebudayaan yang membawahi Jogoboro. Untuk mendukung SRI dan Jogoboro, fasilitas-fasilitas penunjang yang masih kurang dipenuhi misalnya ambulans, perahu dan kendaraan ATV, yang didanai dengan Dana Keistimewaan. "Upaya inilah yang diharapkan Danais betul-betul memberikan da-

ya guna bagi masyarakat terkait ketenteraman dan ketertiban," ujar Aris.

Marjono mengatakan, SRI berinduk ke Satpol PP bidang Linmas. Ketugasannya, SRI ditempatkan di titik-titik objek wisata di DIY untuk menjaga ketertiban umum, membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan dan membantu wisatawan (mancanegara, domestik) agar merasa aman dan nyaman. Saat ini jumlah personel SRI di seluruh DIY 328 personel yang dibagi dalam delapan wilayah di Pantai Sadeng, Pantai Parangtritis, Waduk Sermo, Kaliurang. Di masa pandemi, SRI ikut membantu penanganan Covid-19 seperti membantu penyekatan jalan dan penerapan akses ke objek wisata dan membentuk tim kubur cepat.

Sedangkan Ahmad Hartono menuturkan, ketugasan Jogoboro adalah menjaga kenyamanan pengunjung di sepanjang Jalan Malioboro (mulai utara Hotel Inna Malioboro hingga Ngejaman). Menurutnya, jumlah personel Jogoboro 110 personel yang secara bergantian melakukan patroli di sepanjang Malioboro selama 24 jam. "Kami siap melayani pengunjung Malioboro sehingga mereka merasa aman nyaman dan Malioboro tetap rapi," katanya. (Dev)

CALON ANGGOTA KPU-BAWASLU Keterwakilan Perempuan, Terpenuhi

JAKARTA (KR) - Keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam daftar nama-nama calon anggota KPU-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022-2027 yang telah disampaikan Tim Seleksi kepada Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi kalangan DPR. Anggota Komisi II DPR Guspari Gaus, menilai, Timsel telah menunjukkan komitmennya untuk mengakomodir keterwakilan perempuan.

"Dari 14 nama calon anggota KPU, 4 orang adalah perempuan, sementara dari 10 nama calon anggota Bawaslu juga terdapat 3 orang perempuan," kata Gaus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/1).

Ia menyatakan, komposisi keterwakilan perempuan dalam daftar nama calon anggota KPU dan Bawaslu telah sesuai amanat UU No 7/2017 tentang Pemilu. Menurutnya, pasal 10 ayat (7) dan pasal 92 ayat (11) UU Pemilu mengamanatkan komposisi keanggotaan KPU dan Badan Pengawas Pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. "Komisi II DPR akan menentukan tujuh nama dari 14 nama calon anggota KPU dan 5 nama dari 10 nama calon anggota Bawaslu untuk dipilih sebagai anggota KPU dan Bawaslu melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap DPR harus menjaga komitmen keterwakilan perempuan didalam komposisi anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027. (Sim)-f

PEMDA DIY LACAK OMICRON 15 Sampel Diperiksa

YOGYA (KR) - Untuk melacak dan mengidentifikasi kemungkinan adanya varian Omicron di DIY, Pemda DIY telah mengirim 15 sampel untuk diperiksa Whole Genom Sequencing (WGS). Sebanyak 15 sampel tersebut dikirim ke Universitas Gadjah Mada dan Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates untuk menjalani pemeriksaan dengan metode WGS.

Belasan sampel pasien itu diperiksa lebih lanjut karena terjadi penularan cepat di lingkungan keluarga dan memiliki cycle threshold (CT) value di bawah 30.

"Untuk yang Kabupaten Kulonprogo dikirim tiga hari lalu ada delapan sampel, itu dari dua keluarga. Sedangkan untuk Kota Yogya ada tujuh sampel baru kemarin. Jadi lebih dahulu yang Kulonprogo. Estimasi pemeriksaan sampel tersebut butuh waktu sekitar dua pekan. Karena baru dikirim beberapa hari lalu, sehingga sampai Kamis belum ada hasil yang keluar," kata Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembujun Setyaningastutie di sela-sela vaksinasi booster di JEC, Kamis (13/1).

Menurut Pembujun, delapan sampel dari kluster di Kulonprogo langsung dikirim meski tidak semuanya memiliki CT value di bawah 30. Alasannya, selain karena penularannya cepat juga berada dalam lingkungan keluarga. Saat ini daerah ditarget Pemerintah Pusat mengirimkan 70 sampel setiap bulan. Untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron, Pemda DIY menyiapkan sejumlah langkah. (Ria/Ira)-f

TUNTASKAN KASUS DI MUSI BANYUASIN KPK Panggil Alex Noerdin

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Alex Noerdin dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, tahun anggaran 2021 yang menjerat anaknya, Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex.

"Ia diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan dilakukan di Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan Kota Palembang, Sumatera Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/1).

Selain Alex Noerdin yang merupakan ayah Dodi Reza Alex, KPK juga memanggil istri Dodi, yakni Erini Mutia Yufada sebagai saksi. Kemudian, ada pula empat saksi lainnya, yaitu Komisaris PT Perdana Abadi Perkasa Sandy Swardi, Pengelola PT Bangka Cakra Karya, PT Fajar Indah Satyanugraha, PT Bahana Pratama Konstruksi, dan PT Karya Mulia Nugraha Yuswanto, Advokat Soesilo Aribowo serta Erlin Rose Diah Arista selaku mahasiswa. Selain Dodi Reza Alex (DRA), KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umak (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH). (Ful)-f



KR-Franz Boediuskarnanto

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X meninjau pelaksanaan kick-off vaksinasi booster massal di Gedung JEC.